

# Dampak Demokratisasi Sistem Pemerintahan Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Nepal Tahun 2016

**Sitti Nuraisyah Amaliah Asnuri**

Faculty of Social and Political Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Email: aisyahamaliah16@gmail.com

## **Abstract**

*The political economy of a country is related to one another and always influences each other on whatever policy applied. For example, in the case raised by the author, it is about how the economy of Nepal is under a democratic system of government. Nepal as a poor-developing country maximizes its industrial production activities to increase its economic growth rate. The development of this production is predicted to run more optimally under a democratic government system. With such assumptions, in 2016 Nepal succeeded in implementing a more democratic system in the government system and its constitution even though the conditions of education and facilities in Nepal did not support the implementation of democracy in the country. This triggered negative implications on its bilateral relations with other countries which later caused Nepal's domestic economic condition to decline and even reached its lowest point in the last 10 years in Nepal.*

## **Abstrak**

Politik ekonomi sebuah negara saling terkait satu sama lain dan selalu saling mempengaruhi pada apapun kebijakan yang berlaku. Sebagai contoh pada kasus yang diangkat oleh penulis yakni mengenai bagaimana kondisi perekonomian Nepal di bawah sistem pemerintahan yang demokratis. Nepal sebagai negara miskin-berkembang memaksimalkan kegiatan produksi industrinya untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonominya. Perkembangan produksi ini diprediksi akan berjalan lebih maksimal di bawah sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan asumsi seperti demikian, pada tahun 2016 Nepal berhasil menerapkan sistem yang lebih demokratis pada sistem pemerintahan dan konstitusinya walaupun kondisi pendidikan dan fasilitas Nepal belum mendukung akan berlakunya demokrasi di negara tersebut. Hal ini memicu implikasi negatif pada hubungan bilateralnya dengan negara lain yang kemudian menyebabkan kondisi perekonomian dalam negeri Nepal menurun bahkan mencapai titik paling rendah sepanjang 10 tahun terakhir di Nepal.

## **Kata Kunci**

Demokrasi; sistem pemerintahan; stabilitas ekonomi; hubungan bilateral antar negara;

---

---

## **Pendahuluan**

Masalah pembangunan ekonomi, politik, dan sosial menjadi semakin global dan saling terkait antara satu negara dan lainnya. Kecenderungan tersebut semakin menguat sampai abad 21 ini, terutama karena pengaruh teknologi dan modal.

Siasat atau perencanaan ekonomi termasuk dalam politik ekonomi, yang merupakan pilihan politik dari suatu negara dan masyarakatnya. Politik ekonomi merupakan siasat atau cara untuk melaksanakan kebijakan ekonomi suatu negara berdasarkan pilihan politiknya. Semua usaha melaksanakan politik ekonomi tersebut tidak lepas dari basis teori ekonomi yang bisa menjadi titik terang menuju tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi dan lebih meluas.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan menggambarkan bagaimana negara tersebut berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia di dalam lingkup negara tersebut. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat diukur dengan melihat angka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Semakin tinggi PDB per kapita, maka semakin sejahtera masyarakat negara tersebut. Perekonomian sebuah negara harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertambahan penduduk agar PDB per kapita terus meningkat. Sebagai contoh, jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2% pertahunnya, maka pertumbuhan PDB harus lebih besar dari 2% per tahun.

Keadaan pertumbuhan ekonomi yang terus bertahan dalam angka tertentu akan menciptakan keadaan stabilitas ekonomi yang baik dalam sebuah negara. Stabilitas ekonomi adalah kondisi ekonomi dimana tidak terjadi perubahan yang terlalu besar atau fluktuasi dalam permasalahan makroekonomi. Ekonomi yang stabil dapat dilihat dari ekonomi yang pertumbuhan outputnya tetap, tidak memiliki inflasi tinggi atau mengalami banyak perubahan, serta tidak sering mengalami resesi. Ekonomi yang stabil

memungkinkan kondisi ekonomi yang baik seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.

Nepal termasuk sebagai salah satu negara miskin-berkembang. Nepal sangat sering menghadapi krisis perekonomian makro berupa kemiskinan dan inflasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Nepal berjalan sangat lambat namun dapat dikatakan stabil di setiap tahunnya. Nepal membutuhkan banyak pertumbuhan produksi untuk menunjang ekonomi dalam negaranya namun tidak didukung dengan kondisi iklim dan geografis serta sarana prasarana yang mendukung.

Pada umumnya, negara-negara sedang berkembang memandang industri yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan ini berdasarkan pada penelitian-penelitian empiris bahwa negara-negara yang telah maju dan kaya ternyata lebih banyak menekankan pada bidang industri, berbeda dengan negara-negara yang sedang berkembang lebih banyak menekankan pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya sumbangan sektor tersebut terhadap PDB negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang sektor industri memberikan sumbangan terhadap PDB hanya berkisar antara 20-30%. Ketika diadakan observasi peranan sektor industri terhadap PDB pada awalnya memang hanya menyumbangkan sebesar tersebut di atas, namun kedepannya ternyata telah terjadi peningkatan sekitar 40-50% dari seluruh produksi nasional.

Kondisi iklim dan geografis Nepal tidak mendukung adanya sumber daya alam yang bisa diolah sebagai bahan dasar kebutuhan utama dalam suatu produksi, yaitu bahan bakar. Melihat segala keterbatasan penghasilan bumi Nepal serta

segala keterbatasan masyarakatnya dalam mengolah hasil bumi, Nepal akhirnya memutuskan untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara di dunia yang dapat menyuplai kebutuhan produksi dalam negeri, utamanya dengan negara tetangganya yang paling dekat yakni India.

Hubungan bilateral antar negara menjadi sangat penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang sangatlah tidak mungkin bagi suatu negara bertahan dengan tidak bergantung dengan negara lainnya. Melalui hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dicapai dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan. Ketergantungan dalam hubungan antar negara terjadi di berbagai bidang kehidupan baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial maupun olah raga.

Bergantinya sistem pemerintahan di Nepal sangat jarang menemui permasalahan yang menggoyahkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nepal. Perubahan sistem pemerintahan Nepal yang sebelumnya tidak pernah berdampak besar pada sejumlah bidang baik ekonomi maupun bidang lainnya dalam negeri Nepal namun pada tahun 2015 setelah adanya demokratisasi pada sistem pemerintahan dan konstitusi Nepal, muncul implikasi negatif pada hubungan bilateralnya terhadap negara lain yang kemudian menyebabkan jatuhnya stabilitas ekonomi Nepal pada tahun 2015 hingga tahun 2016.

## **PEMBAHASAN**

### **DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN NEPAL**

Sebelum terbentuknya negara Nepal yang dipimpin oleh raja pertamanya Prithvi Narayan Shah, jauh pada tahun-tahun sebelum masehi terdapat banyak kerajaan-

kerajaan kecil yang tersebar di sekitar pegunungan Himalaya. Kerajaan-kerajaan tersebut lalu berusaha ditaklukkan oleh Prithvi Narayan Shah pada pertengahan abad ke-18 menggunakan metode kerja sama maupun dengan cara berperang. Metode ini akhirnya berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tersebut dengan keyakinan pada Prithvi Narayan Shah yang menyatakan bahwa dia akan mendedikasikan dirinya yang masih berusia muda untuk mewujudkan kerajaan yang damai di Lembah Kathmandu.

Nepal mengalami beberapa perubahan aturan dalam negeri dan kebijakan dalam menjalani hubungan bilateral dengan negara atau kerajaan lainnya. Perbedaan ini selalu berubah seiring bergantinya Raja yang memimpin kerajaan saat itu. Meski adanya perubahan kebijakan yang berlaku, sistem yang dianut tetaplah monarki, di mana raja memimpin dan memiliki kekuasaan penuh terhadap segala hal yang terjadi di dalam lingkup wilayahnya.

Tingginya kekuasaan seorang raja pada masa itu menimbulkan banyak protes dari rakyatnya. Kekuasaan raja saat itu digunakan semena-mena dan peraturan yang berlaku juga tidak dapat membuat masyarakatnya semakin sejahtera. Berbagai kebijakan di bawah negara bersistem monarki yang dikuasai oleh raja dan diatur oleh perdana menteri mengalami banyak protes keras dari masyarakatnya sehingga terjadi beberapa kali gerakan reformasi. Masyarakat yang memberontak ini juga ingin membebaskan Nepal dari pendudukan Rana yang bersifat otoriter dan banyak memakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Memupuknya ketidakpercayaan ini menyebabkan kerusuhan bertahun-tahun dan perang internal di Nepal antara

masyarakat dan pihak pemerintah. Hingga akhirnya pada Mei 1991, Nepal menyelenggarakan pemilihan parlemen pertamanya dalam hampir 50 tahun. Pergantian ini masih belum dirasakan baik bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat Nepal. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat itu membuat seluruh harga produk kebutuhan sehari-hari masyarakat meningkat drastis.

Pada Februari 1996, salah satu anggota Partai Komunis India atau Maois memulai upaya untuk menggantikan monarki parlementer dengan republik demokratik rakyat baru, melalui strategi revolusioner Maois yang dikenal sebagai perang rakyat, yang menyebabkan Perang Sipil Nepal.

Dalam menghadapi pemerintahan yang tidak stabil dan pengepungan Maois di Lembah Kathmandu pada bulan Agustus 2004, dukungan mayoritas untuk monarki mulai berkurang. Pada 1 Februari 2005, Gyanendra memecat seluruh pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan eksekutifnya tanpa nasihat menteri, menyatakan "keadaan darurat" untuk menumpas gerakan Maois. Politisi ditempatkan di bawah tahanan rumah, telepon dan garis internet dipotong, dan kebebasan pers sangat dibatasi.

Rezim baru raja membuat sedikit kemajuan dalam tujuan yang dinyatakannya untuk menekan para pemberontak. Uni Eropa menggambarkan pemilihan umum Nepal pada Februari 2006 sebagai "langkah mundur demokrasi sementara", karena partai-partai besar memboikot pemilu dan tentara memaksa beberapa kandidat untuk mencalonkan diri.

Pada April 2006 pemogokan dan protes di Kathmandu memaksa raja untuk mengembalikan parlemen. Pada 15 Januari 2007, sebuah sistem koalisi partai-partai di

bawah konstitusi sementara mengatur Nepal. Majelis Konstituante Nepal mulai berbuah pada tanggal 24 Desember 2007 ketika diumumkan bahwa monarki akan dihapuskan pada tahun 2008 setelah pemilihan Majelis Konstituante dan pada tanggal 28 Mei 2008, Nepal dinyatakan sebagai Republik Demokratik Federal hingga saat ini. Tanggal 18 Mei telah dinamai Loktantrik Day (Democracy Day) oleh mayoritas masyarakat Nepal.

Pada 28 Mei 2008, Majelis Konstituante yang baru terpilih menyatakan Nepal sebagai Republik Demokratik Federal, menghapus sistem monarki yang telah bertahan selama 240 tahun dan tanggal 11 Juni 2008, mantan Raja Gyanendra meninggalkan istana. Ram Baran Yadav dari Kongres Nepal menjadi Presiden pertama Republik Demokrasi Federal Nepal pada 23 Juli 2008.

Demikian pula, Majelis Konstituante memilih Pushpa Kamal Dahal (dikenal sebagai Prachanda) dari Partai Komunis Terpadu Nepal (Maois) sebagai Perdana Menteri Republik pertama pada 15 Agustus 2008.

Saat ini Nepal menggunakan Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 20 September 2015, menggantikan Konstitusi Sementara yang diterapkan pada tahun 2007. Konstitusi Nepal 2015 ini terdiri atas 35 bab, 308 pasal dan 9 perencanaan. Konstitusi ini disusun oleh Majelis Konstituante Kedua setelah adanya kegagalan Majelis Konstituante Pertama untuk menghasilkan konstitusi dalam periode mandat setelah terjadinya bencana gempa bumi yang sangat besar pada April tahun 2015.

Konstitusi ini merekonstruksi Nepal menjadi tujuh provinsi serta menyelesaikan transisi Nepal dari monarki konstitusional ke republikanisme dan dari sistem kesatuan

ke federalisme. Pengesahan konstitusi baru segera menyebabkan kemunculan blokade dari semua pos-pos pemeriksaan di perbatasan Nepal-India. Berbagai Aktivistis Hak Asasi Manusia dan beberapa kelompok etnis di dataran rendah Nepal telah menuduh Konstitusi menjadi diskriminasi gender terutama dalam hal ketentuan kewarganegaraan. Selain itu, pada sisi keagamaan, perubahan ini dianggap tidak menghargai agama Hindu sebagai agama yang sejak awal menjadi dasar Nepal.

## POTENSI PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NEPAL

Perkembangan ekonomi di Nepal telah menjadi rumit dan dipengaruhi oleh perubahan konstan dalam skenario politik yang berkisar dari monarki hingga federal demokratik saat ini serta ditambah kondisi geografi yang rumit mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Nepal sangat lambat. Pertanian tetap menjadi kegiatan ekonomi utama Nepal, mempekerjakan sekitar 65% dari populasi dan menyumbang 31,7% pada angka PDB.

Pada bidang pertanian buah dan sayuran yang dihasilkan adalah apel, pir, tomat, berbagai sayuran, buah persik, madu, kentang, serta beras dan gandum adalah tanaman pangan utama di Nepal. Daerah Tarāi adalah wilayah pertanian utama Nepal dengan kentang, biji minyak, tebu, rami, dan tembakau sebagai hasil bumi utama daerah tersebut.

Berbekal lokasi geografisnya yang dikelilingi pegunungan terkenal di dunia, Nepal memegang aset tinggi dalam hal pendakian gunung. Nepal memiliki beberapa gunung tertinggi dan paling menantang di dunia, termasuk Gunung Everest. Secara teknis, sisi tenggara gunung Everest Nepal lebih mudah didaki, jadi

sebagian besar pendaki lebih memilih melakukan perjalanan ke Everest melalui Nepal. Nepal memasuki era modern pada tahun 1951 tanpa sekolah, rumah sakit, jalan, telekomunikasi, tenaga listrik, industri, atau layanan sipil yang memadai.

Sebagian besar industri didasarkan pada bahan baku pertanian atau tergantung pada berbagai bahan impor yang sebagian besar berasal dari India. Produk manufaktur utama industri Nepal yaitu rami, gula, rokok, bir, korek api, sepatu, semen, dan batu bata. Industri rumahan tradisional seperti keranjang dan karpet tenun juga penting bagi ekonomi Nepal. Industri karpet dan garmen yang berorientasi ekspor telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini mencapai sekitar 70% dari ekspor barang dagangan.

Aktivitas industri terhitung hanya mempekerjakan 3 persen dari populasi. Nepal menderita karena kurangnya investasi internal dan eksternal. Hal ini berasal dari tabungan domestik yang rendah, pasar domestik yang kecil, kekurangan tenaga kerja terampil, administrasi publik yang korup dan tidak efisien, biaya transportasi dan operasional yang tinggi, kurangnya sumber daya listrik dan, semakin, ketidakstabilan politik. Baru-baru ini ada upaya untuk mendorong investasi dan privatisasi melalui Kebijakan Industri 1992 dan Investasi Asing dan Kebijakan Satu Jendela 1992, dan penciptaan pusat industri dengan tanah dan bangunan pemerintah yang disewa untuk usaha swasta.

Negara ini berhasil membuat kemajuan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejak 1950-an dan membuka negaranya untuk liberalisasi ekonomi yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup dibandingkan dengan masa lalu. Tantangan

terbesar yang dihadapi oleh negara dalam mencapai pembangunan ekonomi yang lebih tinggi adalah seringnya perubahan dalam kepemimpinan politik dan juga korupsi serta keadaan alam.

#### UPAYA PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI NEPAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan Nepal sebagai salah satu negara paling terbelakang di dunia. Produk domestik bruto (PDB) negara itu adalah \$ 10,3 miliar pada 2007, dengan estimasi PDB per kapita \$ 367 pada tahun 2016. Beberapa faktor telah berkontribusi pada keterbelakangan Nepal, termasuk geografi yang terkurung daratan, medan yang sulit, kurangnya sumber daya alam, dan infrastruktur yang buruk. China, India, Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa telah melakukan investasi besar dalam ekonomi Nepal melalui bantuan asing sejak tahun 1952. Namun, pertumbuhan ekonomi Nepal berjalan lambat.

Nepal telah menggunakan serangkaian rencana untuk lima tahun kedepan sebagai upaya untuk membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Perencanaan ini diharapkan dapat menyelesaikan rencana pembangunan ekonomi Nepal yang dibuat sejak tahun 2002, yaitu dengan menjadikan mata uangnya konvertibel dan 17 perusahaan negara telah diprivatisasi dari pengaruh asing. Bantuan asing ke Nepal menyumbang lebih dari setengah anggaran pembangunan. Prioritas pemerintah selama bertahun-tahun adalah pengembangan fasilitas transportasi dan komunikasi, pertanian, dan industri. Sejak tahun 1975, peningkatan administrasi pemerintahan dan upaya pembangunan pedesaan telah ditekankan secara berkelanjutan.

Nepal dengan keadaan geografis yang sulit, menyebabkan sulitnya mengelola bahan-bahan dasar perindustrian membutuhkan pertolongan dari negara lainnya. Hanya bergantung pada hasil agrikultur tidak banyak membantu perekonomian Nepal menjadi lebih baik. Melihat kondisi ini, pemerintah Nepal memutuskan untuk melakukan hubungan bilateral antar-negara di dunia. Nepal melakukan hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dengan banyak negara. Negara-negara yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Nepal yakni Argentina, India, China, European Union, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang.

Hubungan bilateral ini dicanangkan oleh pemerintah Nepal dalam bentuk perjanjian baik menerima hadiah hibah dari negara kerja samanya maupun kontrak perdagangan ekspor dan impor yang bertujuan untuk mengembangkan produksi industri di dalam negerinya dan memperluas pasar nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak. Dana hibah dari negara-negara kerja samanya diberikan untuk membantu Nepal keluar dari angka kemiskinan dengan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur masyarakat, mengangkat derajat pendidikan di Nepal, dan pengembangan industri dalam berbagai hal untuk menopang perekonomian masyarakat.

Dalam hal ekspor, Nepal mengutamakan ekspor karpet, pakaian, barang-barang kulit, barang rami dan biji-bijian yang bernilai tukar \$ 822 juta. Ekspor teratas Nepal adalah *Flavored Water* (\$ 92.2M), karpet rajut (\$ 75.7M), grosir benang serat stapel sintetis (\$ 58.4M), pala (\$ 34.3M) dan produk plastik lainnya (\$ 33.2M). Tujuan ekspor utama Nepal adalah India (\$ 376M), Amerika Serikat

(\$ 91.1M), Jerman (\$ 32.4M), Turki (\$ 30.9M) dan Inggris (\$ 25.8M).

India mendominasi lebih dari setengah kegiatan ekspor Nepal, yakni berada pada angka 54%, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 13%, Jerman 5%, Jepang 2%, Turkey 4%, Perancis 2%, China 3%, Inggris 4%, dan negara lainnya 13%.

Dalam hal impor, Nepal mengutamakan impor emas, mesin dan peralatan industri maupun layanan sarana prasarana, produk minyak bumi dan pupuk pertanian dengan total sekitar US \$ 2 miliar pertahunnya. Impor utamanya adalah *Refined Petroleum* (\$ 566M), emas (\$ 188M), sepeda motor (\$ 175M), beras (\$ 173M) dan mobil (\$ 167M). Asal impor teratas adalah India (\$ 4,52B), China (\$ 863M), Uni Emirat Arab (\$ 348M), Hong Kong (\$ 158M) dan Singapura (\$ 72,7M). India juga menguasai lebih dari setengah kegiatan impor di Nepal yakni sebesar 69% dari keseluruhan negara pengimpor di Nepal. Di urutan ke dua terbesar adalah China dengan 13%, United Arab Emirates 5%, Argentina dibawah angka 1%, Hongkong 2%, Jepang 1%, Singapore 1%, dan negara lainnya terbagi dalam angka 9%.

Hubungan diplomasi Nepal-India khususnya dalam aspek ekspor-impor tidak selalu berjalan mulus. Hingga akhirnya sejak akhir 2015, masalah budaya dan politik telah tegang hubungan antara kedua negara dengan sentimen anti-India yang tumbuh di antara pemerintah dan rakyat Nepal. Pada bulan September 2015, Presiden Nepal, Ram Baran Yadav, mengundang-undangkan konstitusi baru Nepal meskipun ditentang oleh kelompok-kelompok minoritas di wilayah selatan Nepal dimana kampung halaman mereka akan terpecah di bawah konstitusi yang baru. Hal itu ditentang oleh beberapa

kelompok masyarakat yang menginginkan Nepal tetap menjadi negara dengan simbol Kerajaan Hindu, dan kelompok lainnya merasa konstitusi itu tidak menguntungkan bagi penduduk yang tinggal di dekat perbatasan India.

Segala upaya kerja sama bilateral dan upaya pemerintah Nepal dalam kegiatan ekspor dan impor produk dengan negara lain sangat diharapkan dapat mampu menuntaskan angka kemiskinan di Nepal. Penuntasan angka kemiskinan di negara miskin-berkembang seperti Nepal ini dapat membantu Nepal menaikkan status kesejahteraan dan status perekonomian negaranya di tahun yang akan mendatang. Kegiatan ekspor dan impor ini menjadi kegiatan utama Nepal selain pertanian karena dapat menunjang bidang produksi industri Nepal. Industri mendapatkan kepercayaan yang lebih daripada ketergantungan pertanian di Nepal dikarenakan berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya, utamanya faktor geografis Nepal.

Upaya ini tentunya perlu didukung oleh sistem pemerintahan yang kredibel dan dapat dipercaya untuk mengolah sumber daya alam dan manusia yang ada di Nepal. Di bawah tekanan berubahnya sistem pemerintahan dan juga pergantian konstitusi yang berlaku dalam sebuah negara juga dapat mempengaruhi kelajuan ekonomi sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memegang kekuasaan negara.

Pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi juga harusnya diikuti oleh pemikiran lebih luas terhadap dampak apa saja yang akan terjadi ketika hal itu diterapkan, kepentingan nasional dalam negeri sangatlah penting namun hubungan antar negara juga tidak boleh dikesampingkan. Terlebih negara

diplomasi itu berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi dalam negeri yang lebih lanjut mampu membantu masyarakat lebih sejahtera.

#### DAMPAK DEMOKRATISASI SISTEM PEMERINTAHAN TERHADAP STABILITAS EKONOMI NEPAL

Mengacu pada pemikiran *balanced growth theory*, Nepal sebagai negara berkembang melakukan kegiatan industri untuk menaikkan angka stabilitas ekonominya dan hal ini didukung dengan adanya kegiatan ekspor dan impor baik bahan mentah maupun hasil jadi industri tersebut.

Tingginya ketergantungan pada kegiatan ekspor dan impor ini kemudian membawa Nepal pada hubungan bilateral dengan beberapa negara termasuk India sebagai *partner* pemasok bahan produksi industri terbesar sekaligus importir hasil industri terbesar di Nepal.

Hubungan bilateral Nepal dan India sangatlah erat di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Hubungan kedua negara ini terus terjalin di bawah tekanan reformasi konstitusi dan sistem pemerintahan Nepal. Posisi India sebagai negara sahabat Nepal sangatlah kuat. Salah satu bukti dari pernyataan ini telah terlampirkan sebelumnya di mana India memberikan kontribusi paling besar pada berbagai aspek pembangunan di Nepal. Besarnya angka ekspor dan impor India dan Nepal juga menggambarkan besarnya kepercayaan yang diberikan masing-masing negara ini dibandingkan dengan negara lainnya.

Perenggangan hubungan Nepal dan India sering terjadi dan terus mengakibatkan menurunnya kepercayaan pada pihak masing-masing negara. Hingga akhirnya pada tahun 2015, setelah teradopsinya demokrasi penuh pada sistem

pemerintahan dan konstitusi Nepal, hubungan kedua negara berada pada puncak kerenggangan hubungan bilateral yang menyebabkan India harus memutuskan kerja sama dalam bidang perdagangannya dengan Nepal sebagai bentuk 'sangsi' akan kebijakan barunya tersebut.

Keputusan India ini dikarenakan meledaknya demonstrasi yang dilakukan komunitas orang Madhesi imigran India di Nepal, Janajatis, dan Tharus untuk memprotes Undang-Undang Dasar baru dari negara ini serta diakibatkan oleh pihak India sebelumnya yang telah memblokir sumber suplai bahan bakar Nepal sehingga menimbulkan kekurangan komoditas utama dan bahan bakar secara serius di Nepal.

Demokratisasi yang dilakukan oleh Nepal terkesan tidak memperdulikan aspek-aspek tertentu dan dampak yang akan muncul ketika hal ini direalisasikan. India sebagai negara yang paling dekat dengan Nepal menganggap keputusan demokratisasi ini akan membatasi pergerakan politik ekonomi India di Nepal. Dimulai dari perbatasan wilayah yang memecah kesatuan imigran India di pinggiran Nepal, hingga keputusan membebaskan masyarakatnya dalam berhubungan bilateral langsung dengan negara lainnya untuk memenuhi negara demokrasi yang seutuhnya. Adanya kebijakan ini membuat kekuatan politik ekonomi India melemah karena akan muncul saingan negara lain yang lebih banyak dari sebelumnya. Nepal juga melakukan demokratisasi dengan memberikan kebijakan mengenai agama bahwa siapapun berhak memeluk agama mana pun yang dikehendakinya dan agama lain dilarang ikut campur pada segala kegiatan umat agama lainnya. Kebijakan ini membuat warga Hindu sebagai warga asli

sejak zaman kerajaan merasa tidak dihargai karena bertubrukan dengan tradisi umat agama lainnya dalam hal konsumsi hewan suci bagi agama mereka yaitu sapi. Hal inilah yang membawa banyak kerusakan terjadi pasca demokratisasi sistem pemerintahan Nepal.

Terlukanya masyarakat India dan masyarakat yang terhubung melalui kebudayaan yang erat antar Negara di Nepal menyebabkan pemerintah India mengharuskan untuk memberi sanksi untuk pemerintahan Nepal dalam bentuk pemutusan hubungan khusus dalam bidang perdagangan. Segala kegiatan ekspor dan impor dihentikan dan segala produk Nepal dilarang memasuki wilayah India walaupun sifatnya hanya sekedar transit. Sanksi ini bersifat sementara namun dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan ekonomi di Nepal. Hampir seluruh kegiatan bidang pertanian dan produksi di Nepal berhenti setelah diterapkannya sistem baru ini.

India sebagai negara dengan kekuatan yang lebih besar atas Nepal, selama ini selalu mendapatkan perlakuan khusus dari Nepal. Mengingat kerentanan geografis Nepal, secara tidak langsung wilayah Nepal di selatan India telah mampu dipengaruhi oleh pemerintah India dalam membuat kebijakan luar negeri untuk melayani kepentingan India bahkan walaupun kebijakan tersebut merugikan kepentingan Nepal sendiri. Namun, dengan demokratisasi yang terus berlangsung di Nepal, dan pergeseran kekuasaan negara dari tangan beberapa elit ke lembaga pemerintah yang dipilih secara demokratis, India telah menghadapi peningkatan resistensi di Nepal dalam menerapkan kebijakan luar negeri yang tetap saja berujung pada kerugian kepentingan Nepal sendiri.

Setelah adanya pemutusan hubungan bilateral India dan Nepal, berbagai penurunan angka produksi dan kegiatan perdagangan Nepal terjadi selama beberapa bulan. Sebagai negara miskin-berkembang yang mengandalkan kegiatan produksi untuk menunjang ekonomi nasionalnya, ditambah faktor geografis yang tidak memungkinkan Nepal untuk melakukan kegiatan produksinya, Nepal mengalami depresi ekonomi nasional. Di mana angka PDB, sebagai neraca pengukuran pertumbuhan ekonomi sebuah negara, menurun di Nepal. Kegiatan ekspor yang menurun dan pesatnya kegiatan impor yang tidak diikuti oleh ekspor yang memadai juga akan menyebabkan penurunan stabilitas ekonomi dalam sebuah negara.

Selain penurunan angka PDB yang menjadi bukti pendukung menurunnya stabilitas ekonomi Nepal, penulis juga menemukan data jumlah ekspor dan impor Nepal ke negara lain ikut menurun pada tahun 2015 hingga 2016. jumlah ekspor pada tahun 2016 berada di titik paling rendah setelah terjadinya transisi sistem pemerintahan dan konstitusi di Nepal. Hanya berada di sekitar angka US \$ 0,8 milyar dan terus menurun di tahun selanjutnya. Penurunan ekspor ini dikarenakan oleh sedikitnya bahan produksi yang dapat diolah masyarakat Nepal untuk menghasilkan barang-barang produksi untuk dikirim ke luar Nepal. Hal ini juga menunjukkan bahwa demokratisasi secara tidak langsung benar-benar merugikan negaranya sendiri dalam pertumbuhan ekonomi.

Angka impor Nepal yang cenderung meningkat tiap tahunnya menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari maupun produksi juga meningkat, namun sayangnya hal ini tidak diikuti dengan

pertumbuhan angka ekspor. Hal ini akan menjadikan Nepal berada dalam kondisi defisit negara yang serius dan terjadinya ekonomi tidak seimbang. Demokratisasi yang diharapkan mampu membangkitkan nilai ekspor Nepal pada kenyataannya mengalami masa yang sangat sulit pada masa transisinya.

Selain PDB yang menurun, angka impor yang naik dan tidak diimbangi oleh ekspor yang naik, penurunan stabilitas Nepal juga dapat dilihat dari total hasil produksi dalam kurun waktu tertentu.

adanya penurunan drastis dalam produksi industri dalam negeri Nepal pada tahun 2016 pasca berlangsungnya sanksi India terhadap Nepal. Bahkan menyentuh angka -6,3%. Angka defisit ini sangat jauh menurun dibandingkan pada awal tahun 2015 yang menyentuh angka 8,75% yang merupakan pertumbuhan produksi paling signifikan dalam 10 tahun terakhir. Penurunan angka produksi ini tentunya semakin menguatkan bukti menurun drastisnya stabilitas ekonomi Nepal secara tidak langsung sebagai dampak demokratisasi sistem pemerintahan dan pergantian konstitusi Nepal di tahun 2015.

Selain segala bentuk penurunan stabilitas ekonomi di Nepal, angka kemiskinan di Nepal ikut meningkat pada masa transisi ini. Banyaknya masyarakat yang menutup produksi rumahnya dikarenakan tidak adanya pasokan bahan mentah produksi dan juga langkanya bahan bakar saat itu. Kerugian ini tentunya akan berdampak ke banyak aspek kehidupan Nepal yang semakin menerangkan bahwa konsep hubungan demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi benar-benar seutuhnya dikendalikan oleh pemerintah yang mengambil alih kekuasaan, bukan karena berubahnya sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Banyak negara yang

tidak menganut sistem demokrasi namun tetap dapat menumbuhkan perekonomiannya dengan pesat, yakni negara China sebagai contohnya. Satu pemimpin dan satu aturan dapat mendorong perekonomian negara itu maju dan menguasai mayoritas perdagangan di dunia.

Banyaknya faktor-faktor penentu kesejahteraan masyarakat yang rendah, hal ini membuktikan demokratisasi Nepal benar-benar berdampak bagi menurun drastisnya perekonomiannya. Kepercayaan diri Nepal untuk mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan dan konstitusinya dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya melalui kebebasan berusaha industri membuat Nepal buta akan prediksi kemunculan implikasi negatif pada hubungan bilateralnya yang kemudian mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negerinya.

## **KESIMPULAN**

Kondisi dan perilaku politik dalam sebuah negara dapat menentukan arah politik ekonominya untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Sistem pemerintahan yang masih labil tidak akan membantu kestabilan ekonomi negerinya, baik yang didukung oleh faktor perilaku masyarakat maupun faktor eksternal yang berasal dari kebijakan negara lain dalam menghadapi pemerintahan yang berlangsung.

Demokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahan yang dianggap paling baik untuk mensejahterakan masyarakatnya banyak diterapkan di berbagai negara. Di bawah sistem ini, masyarakat dapat hidup dengan bebas di bawah pemerintahan yang dipilih oleh mereka sendiri. Tingginya perlindungan HAM juga menyebabkan banyak warga di dunia lebih menyukai konsep sistem demokrasi daripada sistem

pemerintahan lainnya hingga muncul sebuah konsep bahwa demokrasi dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan HAM, kesejahteraan masyarakat juga dinilai dari sisi pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara dan beberapa pakar mengaitkan bahwa demokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pendapat pakar ini sayangnya tidak dapat diimplementasikan kepada seluruh negara yang telah menerapkan demokrasi di negaranya. Terlebih pada masa krisis transisi antara sistem sebelumnya dan sistem baru yang diterapkan. Hal ini memunculkan pendapat bahwa adanya teori demokrasi yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi itu tidak sepenuhnya benar sesuai dengan penelitian ini.

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat saja tetap berkembang walaupun tidak menggunakan sistem demokrasi sebagai contoh pada kasus di China. Pendapat ini kemudian dapat dilihat pada apa yang terjadi di Nepal saat ini. Keputusan Nepal menerapkan demokrasi penuh terhadap sistem pemerintahan dan konstitusinya justru membawa Nepal pada kondisi ekonomi yang tidak seimbang dalam hal ekspor dan impor serta hilangnya kepercayaan dari negara sahabat paling berpengaruhnya, India

Pemerintah yang berkuasa serta pendidikan masyarakat adalah faktor penentu utama pada pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara penganut demokrasi. Pemerintah yang terpilih melalui jalur demokrasi tidak memberikan garansi akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Diperlukan pemimpin dengan perencanaan negara yang baik dan

dukungan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Strategi perilaku ekonomi di dalam maupun luar negeri juga menjadi faktor penentu yang mempengaruhi laju ekonomi dalam sebuah negara. Terciptanya hubungan bilateral antar negara mengharuskan adanya kepercayaan antara negara-negara bersangkutan dengan kebijakan yang saling menguntungkan baik yang diterapkan antar negara maupun kebijakan dalam negeri yang berpengaruh secara tidak langsung pada negara bilateral tersebut.

Nepal yang sangat bergantung pada kerja sama perdagangan bilateral dengan negara lain mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun 2015 hingga 2016, naiknya angka impor luar negeri yang diikuti dengan penurunan angka ekspor produk Nepal menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan Nepal. Rendahnya angka ekspor ini disebabkan oleh tidak adanya bahan mentah yang diimpor dari India sehingga produksi di Nepal tersendat dan banyak pengusaha yang menutup perusahaannya atas kerugian yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang diterapkan oleh Nepal yang diharapkan dapat membantu perekonomian Nepal naik dari tahun-tahun sebelumnya justru membawa negaranya semakin sengsara dan kehilangan sumber trading utamanya karena pergantian sistem dan konstitusi tidak diikuti dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki perencanaan yang baik bagi Nepal kedepannya sekaligus tetap mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang diterapkan oleh Nepal yang diharapkan dapat membantu perekonomian Nepal naik dari tahun-tahun sebelumnya justru membawa negaranya semakin sengsara dan

kehilangan sumber trading utamanya yaitu India karena pergantian sistem dan konstitusi tidak diikuti dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki perencanaan yang baik bagi Nepal kedepannya sekaligus tetap mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara lainnya.

## REFERENSI

- Bjork, Gordon J. 1999. *The Way It Worked and Why It Won't: Structural Change and the Slowdown of U.S. Economic Growth*. Westport, CT, London: Praeger. ISBN 0-275-96532-5.
- Cypher, James M., dan James L. Dietz. 2008. *The Process of Economic Development (3rd Revised ed.)*. Hlm. 640. Routledge. ISBN 0-415-77104-8.
- Dailymail UK. 2014. *India, Nepal Sign \$1 Billion Hydropower Deal*. <https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2848600/India-Nepal-sign-1-billion-power-deal.html>  
Diakses pada 17 November 2018
- Gerring, John. Peter Kingstone, Matthew Lange, Aseema Sinha. 2011. *Democracy, History, and Economic Performance: A Case-Study Approach*. USA: Elsevier Ltd.
- Hoftun, Martin, William Raeper and John Whelpton. 1999. *People, Politics and Ideology: Democracy and Social Change In Nepal*. Kathmandu: Mandala Book Point.
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Nurkse, Ragnar. 1961. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Parajulee, P. Ramjee. 2000. *The Democratic Transition in Nepal*. United States: America Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Rivera-Batiz, Francisco L., Luis A. 2006. *Democracy, Governance And Economic Growth: Theory And Evidence in Democracy, Participation, and Economic Development: An Introduction*. Cambridge, Massachusetts: Annual Reviews Harvard University.
- Robinson, James A., Acemoglu, dan Johnson. 2005. *Institutions As A Fundamental Cause Of Long-Run Growth*, Handbook of Economic Growth, Volume IA. Cambridge: Elsevier B.V.
- S. K. Misra dan V. K. Puri. 2010. *Economics Of Development And Planning—Theory And Practice (12th ed.)*. Himalaya Publishing House. ISBN 81-8488-829-5.